

Manajemen Pelayanan Administrasi dan Sistem Pengarsipan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Bogor

Siska Aulia Nurjanah^{1*}, Julita Hardianti², Ahmad Fauzan Hilmi³, Windy Nur Dwi

Maharani⁴, Muhammad Rendi Ramdhani⁵

^{1*}Universitas Djuanda, ssskaaulia12@gmail.com

²Universitas Djuanda, julitahrdt@gmail.com

³Universitas Djuanda, fznhilmi26@gmail.com

⁴Universitas Djuanda, windyndmaharani22@gmail.com

⁵Universitas Djuanda, muhammad.rendi.ramdhani@unida.ac.id

Korespondensi: muhammad.rendi.ramdhani@unida.ac.id

ABSTRAK

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam pelayanan administrasi keagamaan Islam, khususnya pencatatan pernikahan dan pembinaan keluarga, namun implementasi manajemen pelayanan di tingkat kecamatan masih perlu dideskripsikan secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelayanan di KUA Kecamatan Ciawi. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap penghulu, penyuluh agama, serta penata layanan, dengan analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pelayanan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Ciawi telah berjalan sistematis sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), didukung oleh penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pencatatan, serta pengarsipan terintegrasi antara arsip digital dan arsip fisik yang terkelola dengan baik. Evaluasi pelayanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berbasis barcode dan sistem pengaduan DUMAS menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat dalam kategori baik, sementara berbagai program pembinaan masyarakat, seperti bimbingan perkawinan, pembinaan remaja, dan penyuluhan keagamaan, berkontribusi dalam penguatan ketahanan keluarga. Penelitian ini terbatas pada satu lokasi penelitian sehingga belum dapat digeneralisasikan secara luas, namun temuan ini berimplikasi bahwa KUA Kecamatan Ciawi berpotensi menjadi model pengelolaan pelayanan administrasi dan pembinaan keagamaan yang efektif di tingkat kecamatan.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Manajemen Pelayanan, Pembinaan Masyarakat, Pelayanan Publik, SIMKAH

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga resmi negara yang berperan melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kabupaten/kota dalam bidang urusan keagamaan Islam di wilayah kecamatan. Salah satu fungsi utama KUA adalah menyelenggarakan pencatatan pernikahan bagi masyarakat muslim di setiap kecamatan (Mayangsari et al., 2016). Selain berfokus pada pencatatan pernikahan, KUA juga memberikan pelayanan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, kualitas pelayanan KUA menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak sipil masyarakat, ketertiban administrasi negara, serta pembentukan ketahanan keluarga sebagai unit dasar dalam kehidupan sosial.

Seiring dengan tuntutan perbaikan tata kelola pemerintahan dan perkembangan teknologi informasi, KUA dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Digitalisasi pencatatan pernikahan melalui sistem informasi serta pengelolaan arsip yang tertata menjadi upaya penting dalam meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas layanan publik. Selain itu Pelaksanaan surat menyurat di KUA Kecamatan Ciawi dilakukan secara tertib dan berurutan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari penerimaan surat, pencatatan, hingga pendistribusian dan pengarsipan. Surat menyurat perlu dikelola secara sistematis dan berurutan sebagai bagian dari kegiatan utama administrasi, sehingga mampu menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama (Damayanti et al., 2024). Selanjutnya ada evaluasi pelayanan melalui partisipasi masyarakat serta pelaksanaan program pembinaan juga menjadi indikator keberhasilan pelayanan KUA secara menyeluruh.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen pelayanan administrasi dan sistem pengarsipan di Kantor Urusan Agama (KUA) telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Anhar et al. (2025) mengkaji optimalisasi pelayanan sistem

informasi administrasi di KUA Geragai dan menyimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi berbasis informasi mampu meningkatkan efisiensi pelayanan serta mempermudah pengelolaan dokumen dan arsip, walaupun masih memerlukan peningkatan pada aspek sumber daya manusia dan sarana pendukung. Adapun penelitian selanjutnya oleh Tulaseket et al., (2024) membahas bagaimana sistem pengelolaan arsip dijalankan di lingkungan kantor distrik pemerintahan dan menemukan bahwa sistem pengarsipan yang belum efektif berdampak terhadap kelancaran administrasi, Selanjutnya penelitian oleh Yuanalifianti, (2008) berfokus pada pengelolaan kearsipan administrasi di bagian tata usaha kantor Kementerian Agama, termasuk masalah penyimpanan, keamanan, fleksibilitas, dan efektivitas pengelolaan arsip.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi yang meliputi alur pelayanan administrasi pernikahan, sistem pencatatan digital, pengarsipan dokumen dan penerapan SOP, mekanisme evaluasi pelayanan publik, serta program pembinaan masyarakat. Melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak KUA, diharapkan artikel ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik pelayanan administrasi keagamaan di tingkat kecamatan serta dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki pelayanan publik ke depannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam manajemen pelayanan administrasi dan sistem pengarsipan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna sosial melalui data non-numerik yang bersifat interpretatif dan induktif (Somantri, 2005). Pendekatan ini dinilai relevan untuk menganalisis alur pelayanan administrasi, penerapan digitalisasi pencatatan, sistem pengarsipan dan

Standar Operasional Prosedur (SOP), evaluasi pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembinaan masyarakat di lingkungan KUA Kecamatan Ciawi.

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Ciawi pada tahun 2025. Subjek penelitian meliputi penyuluh agama, penghulu, dan penata layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan (Hidayat. R, 2025). Melalui tahapan penelitian yang sistematis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas manajemen pelayanan administrasi, sistem pengarsipan, serta upaya peningkatan pelayanan publik dan pembinaan masyarakat di KUA Kecamatan Ciawi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Pelayanan Administrasi

Berdasarkan hasil observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi, Alur pelayanan administrasi pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Proses pelayanan administrasi pernikahan dimulai dari interaksi awal antara masyarakat sebagai pemohon dengan petugas pelayanan, kemudian berlanjut pada tahapan pemeriksaan, verifikasi, dan pengolahan administrasi. Dalam alur ini juga terdapat mekanisme pengembalian berkas apabila persyaratan belum terpenuhi, yang menandakan bahwa setiap tahapan saling berkaitan dan tidak dapat dilanjutkan sebelum seluruh persyaratan dinyatakan lengkap. Pemenuhan persyaratan tersebut dilakukan oleh pasangan calon pengantin di lingkungan tempat tinggal masing-masing, meliputi surat pengantar RT/RW, surat keterangan dari kelurahan, fotokopi KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah semua persyaratan administratif dinyatakan lengkap, pasangan calon pengantin

melanjutkan proses dengan melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Ciawi.



Gambar 1. Alur Pelayanan KUA

Menurut hasil wawancara dengan penata layanan KUA Kecamatan Ciawi, diketahui bahwa pelayanan administrasi pernikahan pada dasarnya sudah mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Petugas menyampaikan bahwa apabila persyaratan sudah lengkap sejak awal, maka proses pelayanan dapat berjalan tertib dan tidak memerlukan waktu yang lama. Pada tahap pendaftaran, petugas kembali melakukan pengecekan data untuk memastikan kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen yang diserahkan. Jika salah satu calon pengantin berasal dari luar Kecamatan Ciawi, maka diperlukan surat rekomendasi nikah dari KUA asal sebagai syarat tambahan sebelum penjadwalan akad nikah dapat dilakukan.

Selain alur pendaftaran pernikahan, KUA Kecamatan Ciawi juga memberikan layanan rujukan dan pembuatan surat rekomendasi untuk menikah. Semua jenis layanan ini dilakukan mengikuti prosedur administratif yang teratur dan terencana, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan keabsahan pernikahan yang dicatat secara resmi oleh negara Penelitian Fajri, (2020) mendukung hal ini, menunjukkan bahwa proses pencatatan pernikahan di KUA dilakukan melalui tahapan administratif yang terorganisir untuk menjaga ketertiban administrasi dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Sistem Pencatatan Digitalisasi

Seiring dengan kemajuan dalam teknologi informasi, KUA Kecamatan Ciawi telah menerapkan sistem pencatatan pernikahan yang menggunakan digital melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Melalui pengamatan yang dilakukan, SIMKAH berfungsi sebagai alat untuk mencatat data pernikahan secara elektronik, mulai dari menginputan data calon pasangan hingga menyimpan arsip pernikahan. Tujuan penerapan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan administrasi dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pencatatan yang biasanya terjadi pada sistem manual.

Dalam wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Ciawi, disampaikan bahwa penerapan SIMKAH sangat membantu dalam proses pencatatan pernikahan karena data menjadi lebih rapi, mudah dilacak kembali, dan dapat meminimalkan kesalahan pencatatan yang sebelumnya sering terjadi pada pengisian dokumen secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa SIMKAH tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keakuratan data pernikahan.

Data pernikahan yang tercatat melalui SIMKAH tersimpan dalam satu tempat, sehingga lebih mudah bagi petugas KUA untuk mengakses informasi dan mengelola arsip pernikahan. Meskipun proses pencatatan sudah dilakukan dalam format digital, KUA Kecamatan Ciawi masih mempertahankan metode pengarsipan manual demi keamanan data. Arsip fisik mengenai pernikahan bahkan masih ada sejak puluhan tahun yang lalu, menunjukkan komitmen KUA dalam menjaga dokumen-dokumen administrasi negara.

Penerapan SIMKAH dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan administrasi pernikahan di KUA. Menurut Dimas et al., (2022) Digitalisasi dalam pencatatan pernikahan juga berperan dalam meningkatkan akurasi data dan transparansi dalam pelayanan publik, meskipun masih perlu dukungan sarana

prasarana dan peningkatan kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia agar sistem dapat berjalan dengan optimal.

Sistem Pengarsipan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

KUA Kecamatan Ciawi menerapkan sistem pengarsipan yang terintegrasi antara arsip digital dan arsip fisik/manual. Arsip digital dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data administrasi serta mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, arsip fisik tetap dikelola secara sistematis sebagai dokumen autentik, bahkan arsip sejak tahun 1950-an masih tersimpan dengan baik dan terjaga kerapihannya. Kondisi ini menunjukkan keseriusan KUA Ciawi dalam menjaga ketertiban administrasi dan keberlanjutan arsip kelembagaan.

Pengelolaan arsip yang tertata tersebut didukung oleh penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh layanan di KUA Kecamatan Ciawi. Menurut (Fitriani et al., 2020) SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi pedoman kerja aparatur dalam memberikan pelayanan administrasi dan keagamaan kepada masyarakat. Kualitas pengelolaan administrasi dan pengarsipan ini menempatkan KUA Ciawi dalam tiga besar nasional sebagai KUA percontohan. Pada tahun 2026, jumlah SOP layanan diperkirakan mencapai sekitar 43 SOP yang mencerminkan luasnya cakupan dan kompleksitas layanan.

Penerapan sistem pengarsipan dan SOP tersebut mencerminkan tata kelola administrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Integrasi arsip digital dan fisik memberikan keseimbangan antara efisiensi pelayanan dan keabsahan dokumen, sementara SOP memastikan setiap proses pelayanan berjalan sesuai standar yang berlaku (Adelia et al., 2025). Dengan sistem yang terstruktur dan pedoman kerja yang jelas, KUA Ciawi berpotensi mempertahankan perannya sebagai model pengelolaan administrasi dan pengarsipan yang baik di tingkat nasional.

Evaluasi Pelayanan Publik

Pelaksanaan evaluasi pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ciawi dilakukan melalui Sistem Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berbasis barcode yang dapat diakses secara daring oleh masyarakat. Berdasarkan hasil lapangan, masyarakat yang menerima layanan di KUA Ciawi umumnya memberikan respon positif terhadap kemudahan prosedur dan sikap ramah petugas pelayanan. Penggunaan barcode dinilai memudahkan masyarakat dalam menyampaikan penilaian, saran, maupun kritik secara langsung tanpa harus melalui proses yang rumit. Data IKM yang terkumpul menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori baik, meskipun masih terdapat beberapa masukan terkait peningkatan kecepatan pelayanan pada jam-jam tertentu serta optimalisasi fasilitas ruang tunggu.

Selain evaluasi melalui IKM, KUA Ciawi juga terhubung dengan sistem pengaduan nasional DUMAS (Pengaduan Masyarakat) yang dikelola melalui laman resmi Kementerian Agama. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, jumlah pengaduan masyarakat melalui DUMAS relatif sedikit, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelayanan telah berjalan dengan cukup baik. Pengaduan yang masuk umumnya berkaitan dengan kebutuhan informasi layanan dan jadwal pelayanan. Setiap laporan yang diterima ditindaklanjuti oleh pihak KUA sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dengan adanya hasil evaluasi ini, KUA Ciawi diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Staf KUA Kecamatan Ciawi, diketahui bahwa pelaksanaan evaluasi pelayanan pada dasarnya telah didukung oleh ketersediaan sistem berbasis digital seperti IKM dan DUMAS yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan penilaian dan pengaduan, serta adanya komitmen petugas untuk menindaklanjuti setiap masukan yang masuk. Namun demikian, masih terdapat kendala yang

memengaruhi kenyamanan dan efektivitas pelayanan, terutama keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu yang kurang memadai ketika jumlah pemohon meningkat, serta fluktuasi volume pelayanan pada waktu tertentu. Selain itu, staf juga menyampaikan bahwa tidak semua masyarakat memanfaatkan sarana evaluasi yang tersedia, sehingga sebagian masukan terkait pelayanan belum tersampaikan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan evaluasi pelayanan tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan sarana prasarana dan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap kualitas layanan.

Sejalan dengan Al-Parihah & Undang, (2023) Evaluasi pelayanan publik merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar pelayanan serta harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang berfungsi sebagai alat ukur kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti kejelasan prosedur, kecepatan layanan, sikap dan kompetensi petugas, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Melalui evaluasi yang sistematis dan terukur, instansi dapat mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan pelayanan sebagai dasar perbaikan ke depan (Beniah Ndraha et al., 2025).

Program Pembinaan Masyarakat

KUA di Kecamatan Ciawi menyelenggarakan berbagai program pembinaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas kehidupan berkeluarga di tengah masyarakat. Program-program tersebut meliputi bimbingan perkawinan (pranikah) bagi calon pasangan suami istri, bimbingan remaja usia sekolah, bimbingan remaja usia nikah, serta Program Relasi Harmoni yang ditujukan bagi pasangan dengan usia pernikahan lebih dari sepuluh tahun. Selain itu, KUA Ciawi juga melaksanakan program KUA *Go To School* sebagai bentuk edukasi

keagamaan di lingkungan sekolah. Seluruh program ini bertujuan untuk membina kesiapan mental, sosial, dan spiritual masyarakat agar mampu membangun keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Pada masa sekarang, Penyuluhan Agama Islam memegang peranan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat sekaligus pengembangan kapasitas diri sebagai aparatur pemerintah. Keberhasilan dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mencerminkan keberhasilan dalam mengelola dan mengembangkan diri sebagai pelayan publik. (Dharmawangsa et al., 2020). Oleh karena itu, efektivitas program pembinaan yang dijalankan KUA tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan keluarga di masyarakat, tetapi juga mencerminkan profesionalitas, kompetensi, serta integritas aparatur dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Dengan demikian, program pembinaan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja KUA sebagai lembaga pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan.

KESIMPULAN

Manajemen pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi telah berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Alur pelayanan administrasi pernikahan dilaksanakan secara sistematis, mulai dari pemenuhan persyaratan administratif, proses verifikasi data, hingga penjadwalan akad nikah, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi bagi masyarakat. Penerapan prosedur yang jelas dan konsisten menunjukkan komitmen KUA Ciawi dalam memberikan pelayanan yang profesional, tertib, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dari sisi pengelolaan data, KUA Kecamatan Ciawi telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terintegrasi dengan sistem pengarsipan manual. Digitalisasi pencatatan pernikahan meningkatkan efisiensi dan akurasi data, sementara pengelolaan arsip fisik yang masih terjaga dengan baik mencerminkan

keseriusan dalam menjaga keabsahan dokumen negara serta kontinuitas administrasi jangka panjang.

Selain pelayanan administrasi, KUA Kecamatan Ciawi juga menunjukkan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik melalui mekanisme evaluasi dan program pembinaan masyarakat. Evaluasi pelayanan dilakukan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berbasis barcode dan sistem pengaduan DUMAS, yang berfungsi sebagai sarana untuk menampung masukan serta menilai kinerja layanan secara berkelanjutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat terus ditingkatkan, khususnya terkait fasilitas pendukung pelayanan. Di samping itu, pelaksanaan program pembinaan seperti bimbingan perkawinan, pembinaan remaja, dan penyuluhan keagamaan turut berkontribusi dalam penguatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, manajemen pelayanan KUA Kecamatan Ciawi dapat dinilai telah berjalan efektif dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai model pelayanan administrasi dan pembinaan keagamaan di tingkat kecamatan.

REFERENSI

- Adelia, N., Amal, A. I., & Hidayah, H. F. (2025). Peran Manajemen Perkantoran dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Peran Manajemen Perkantoran dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi perkantoran se. *Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3 juni), 181–192.
- Al-Parihah, P. H., & Undang, G. (2023). Evaluasi Pelayanan Publik Dalam Upaya Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Soreang. *Jurnal Perceka*, 01(1), 34–38.
- Anisbar Anhar , Al Munip, H. (2025). *Optimalisasi, Sistem Informasi, Pelayanan Administrasi, KUA, Digitalisasi, Efisiensi*. 3, 86–97.

- Beniah Ndraha, A., Waruwu, E., & Zega, A. (2025). Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik di BKPSDM Kota Gunungsitoli Melalui Analisis Prosedur, Identifikasi Kendala, dan Evaluasi Berkala. *Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Disiplin*, 02, 22–30.
- Damayanti, S., Riansyah, M., & Ramdhani, M. R. (2024). *PENGELOLAAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS DI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BNN (PPSDM BNN)*. 3, 10336–10342.
- Dimas, A. R., Agus, S., & Fitria, F. (2022). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Informasi Pada Masyarakat Di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. *Ilmiah Wahana Penndidikan*, 2338(4), 13–34.
- Fajri, H. N. (2020). *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. 1–12.
- Fitriani, V., Studi, P., Pendidikan, M., & Pascasarjana, P. (2020). *Sistem Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pelaksana Pendidikan Islam di Lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Minahasa Utara*. 1–12.
- Hidayat. R. (2025). Langkah Penelitian Menejemen Pendidikan. *Riset Multidisiplin Edukasi*, 2, 509–523.
- Mayangsari, R. R., Fanida, E. H., Ap, S., & Ap, M. (2016). *Efeltifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikan (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya*. 1204067424(June).
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Tulaseket, M. M., Muhda, A., Salmah, U., Negara, I. A., & Muhammadiyah, U. (2024). *Sistem Pengelolaan Kearsipan Administrasi Perkantoran Pada Kantor Distrik Sorong Kota Sorong*. 1(1).

Yuanalifianti, U. M. (2008). *Pengelolaan Administrasi Kearsipan PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEARSIPAN PADA BAGIAN TATA USAHA DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN Ulayya Meiditania Yuanalifianti Meirinawati. 1983–1994.*